

2023



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK**



**PERUBAHAN  
RENCANA KERJA (RENJA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2023**



WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 63 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa perubahan rencana kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa perubahan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 63), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 17 Agustus 2023

WALI KOTA PONTIANAK,  
  
EDI RUSDI KAMTONO



Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 17 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

  
MULYADI



BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 52

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 52 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALI KOTA NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023

PENJABARAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2023

1. Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;
4. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak;
8. Inspektorat Kota Pontianak;
9. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak;
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak;
11. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak;
12. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak;
13. Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak;
15. Dinas Sosial Kota Pontianak;
16. Dinas Perhubungan Kota Pontianak;
17. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak;
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
19. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
20. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak;
21. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak;
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
23. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak;
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak;
25. Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak;
26. Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
27. Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
28. Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
29. Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
30. Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak; dan
31. Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.



## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2023 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari 9 (sembilan) bagian yang ada di lingkup Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2023 ini, diharapkan apa yang telah dituangkan dapat direalisasikan oleh masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak dengan optimal.

Pontianak, Agustus 2023

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-1
1.3	Maksud dan Tujuan	I-5
1.4	Sistematika Penulisan	I-5
BAB II	EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	II-1
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	III-1
BAB V	PENUTUP	IV-1



## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>	<b>JUDUL TABEL</b>	
BAB II	Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2023	II-2
BAB III	Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2023	III-6

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Sekretariat Daerah Kota Pontianak berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.

Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses penyusunan perubahan renja merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun, pada triwulan ke 4 (empat) yang memuat tentang kebijakan , program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pontianak dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

### 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).

19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 52).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 53.30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 53.30).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 63).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 125).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2023 dengan dokumen renja PD Tahun 2023 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2023.

### 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB I. PENDAHULUAN**

**BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

**TAHUN 2023**

**BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**BAB IV. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2023, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak tahun 2023 didasarkan pada Renstra 2020-2024 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Sekretariat Daerah Kota Pontianak sebesar 44,52% masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai, sedangkan target kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 61,88%, ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya pada triwulan III dan Triwulan IV, sehingga target kinerja yang ditetapkan untuk setahun belum tercapai, walaupun pencapaian target kinerja tersebut sudah lebih dari 50% di triwulan II ini.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Pontianak sampai dengan triwulan II Tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

## Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2021-2024			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6			7			8		9			10			11			12=11/6x100%		13=5+11			14=13/4x100%		
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																															
Tujuan PD	1. Meningkatkan Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks RB	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dari Kemempnan RB	83,74	Nilai	10.533.853.478,00	68,98	Nilai	4.306.994.824,00	80,74	Nilai	2.743.929.765,00	Nilai	624.518.707,00	Nilai	625.922.431,00	Nilai	0,00	Nilai	0,00	68,98	Nilai	1.250.441.138,00	68,98	45,57	68,98	Nilai	5.557.435.962,00	82,37	52,76	
	2. meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	IKM Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pontianak dari Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik	Predikat	81.878.937.354	Sangat Baik	Predikat	30.787.451.894	Sangat Baik	Predikat	14.038.507.733	Predikat	745.391.300	Predikat	5.362.066.007	Predikat	-	Predikat	-	Sangat Baik	Predikat	6.107.457.307	Sangat Baik	43,51	Sangat Baik	Predikat	36.894.909.201,00	Sangat Baik	45,06	
	3. meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah	Nilai LPPD	Nilai LPPD Kota Pontianak Dari Hasil Penilaian Pusat	Bintang 4	Predikat	12.841.758.944	Belum Keluar	Predikat	3.926.472.505	Bintang 3	Predikat	3.286.500.940	Predikat	275.286.109	Predikat	278.454.140	Predikat	0	Predikat	0	Belum Keluar	Predikat	553.740.249	Belum Keluar	16,85	Belum Keluar	Predikat	4.480.212.754,00	Belum Keluar	34,89	
Sasaran PD	1. Meningkatnya reformasi birokrasi melalui penataan dan penguatan organisasi, penataan perundang-undangan, penataan ketatalaksanaan	Persentase Perangkat Daerah yang nilai RB nya minimal 71,74	(Jumlah Nilai RB Perangkat Daerah yang nilainya minimal 71,74 dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah)x100	80,00	%	10.533.853.478	Tidak Dapat diukur	%	4.306.994.824	80,00	%	2.743.929.765	%	624.518.707	%	625.922.431	%	-	%	-	Belum Keluar	%	1.250.441.138	#VALUE!	45,57	Tidak Dapat diukur	%	5.557.435.962,00	#VALUE!	52,76	
	2. meningkatnya kualitas pelayanan prima	Persentase nilai IKM perangkat daerah baik	(Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah Baik dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah)x100	100,00	%	81.878.937.354	98,38	%	30.787.451.894	100,00	%	14.038.507.733	%	745.391.300	%	5.362.066.007	%	-	%	-	98,38	%	6.107.457.307	98,38	43,51	98,38	%	36.894.909.201,00	98,38	45,06	
	3. meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai LPPD Kota Pontianak	Nilai LPPD Kota Pontianak Dari Hasil Penilaian Pusat	Sangat Tinggi	Predikat	12.841.758.944	Belum Keluar	Predikat	3.926.472.505	Sangat Tinggi	Predikat	3.286.500.940	Predikat	275.286.109	Predikat	278.454.140	Predikat	0	Predikat	0	Belum Keluar	Predikat	553.740.249	Belum Keluar	16,85	Belum Keluar	Predikat	4.480.212.754,00	Belum Keluar	34,89	



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2021-2024			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
													I		II		III		IV																
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp		K	Satuan	Rp	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12=8+9+10+11			12=11/8x100%		13=5+11			14=13/4x100%		15
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	Nilai RB Sekretariat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat	71,74	Nilai		Belum Keluar	Nilai	71,74	Nilai		Nilai		Nilai		Nilai		Nilai		Belum Keluar	Nilai		Belum Keluar	Nilai		Belum Keluar	Nilai	#VALUE!							
		persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Hasil Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang dilakukan oleh Bagian Prokopim	100	%	191.079.302.664	88,80	%	84.644.650.467	100,00	%	40.231.178.781		%	8.027.386.819		%	11.053.364.818		0	88,80	%	0	88,80	%	19.080.751.637	88,80	47,43	88,80	%	103.725.402.104	88,80	54,28		
		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan Kesekretariatan diperoleh berdasarkan hasil survey dari bagian bagian	100	%		99,36	%		100	%			%			%		99,36	%	99,36	%		99,36	%		99,36			99,36					
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	348	Dokumen/Laporan	508.914.288	174	Dokumen/Laporan	231.663.020	19	Dokumen/Laporan	122.301.400	8	Dokumen/Laporan	17.083.000	3	Dokumen/Laporan	21.876.000	-	Dokumen/Laporan	-	11	Dokumen/Laporan	38.959.000	57,89	31,85	185	Dokumen/Laporan	270.622.020	53,16	53,18				
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	dokumen	194.572.739	30	dokumen	74.860.790	5	dokumen	23.385.800	2	dokumen	3.248.000	1	dokumen	6.724.900		dokumen		3	dokumen	9.972.900	60,00	42,65	33	dokumen	84.833.690	55,00	43,60				
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	116	sub kegiatan		140	sub kegiatan			sub kegiatan			sub kegiatan			sub kegiatan			sub kegiatan		0	sub kegiatan		#DIV/0!		140	sub kegiatan		120,69					
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen			dokumen	29.173.000	2	dokumen	30.000.000		dokumen	2.045.000		dokumen	0		dokumen		0	dokumen	2.045.000	0,00	6,82		dokumen	31.218.000	0,00					
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan	116	sub kegiatan		140	sub kegiatan			sub kegiatan			sub kegiatan			sub kegiatan			sub kegiatan		0	sub kegiatan		#DIV/0!		140	sub kegiatan		120,69					
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4	dokumen	212.680.345		dokumen	79.487.430	2	dokumen	24.153.900		dokumen	0		1	dokumen	7.039.600		dokumen		1	dokumen	7.039.600	50,00	29,14		dokumen	86.527.030	0,00	40,68			
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	Laporan	101.661.204	8	Laporan	48.141.800	10	Laporan	44.761.700	6	Laporan	11.790.000	1	Laporan	8.111.500		Laporan		7	Laporan	19.901.500	70,00	44,46	15	Laporan	68.043.300	93,75	66,93				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2021-2024			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2023)			Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2023(%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Aktif Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5			6			7			8		9			10			11		12=9+10+11			13=5+11			14=13+14=100%							
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan		Rp		
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48	Bulan	100.469.013.419	24	bulan	40.615.929.046	12	bulan	21.072.513.992	3	bulan	4.370.575.642	3	bulan	6.125.118.240	0	bulan	0	0	0	0	0	6	bulan	10.495.693.882	50,00	49,81	30	bulan	51.111.622.928	62,50	50,87	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	bulan	93.862.587.693	24	bulan	37.912.104.946	0	bulan	19.463.381.987		bulan	4.258.941.042		bulan	5.625.349.640		bulan					0	bulan	9.884.290.682	#DIV/0!	50,78	126	Orang/bulan	47.796.395.628	100,00	50,92		
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	bulan	6.512.250.869	24	bulan	2.623.245.825	0	bulan	1.577.336.705		bulan	108.334.600		bulan	487.567.500		bulan					0	bulan	595.902.100	#DIV/0!	37,78	6	dokumen	3.219.147.925	100,00	49,43		
4 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	bulan	94.174.857	24	bulan	80.578.275	0	bulan	31.795.300		bulan	3.300.000		bulan	12.201.100		bulan					0	bulan	15.501.100	#DIV/0!	48,75	6	dokumen	96.079.375	100,00	102,02		
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48	Bulan	87.198.942	24	Bulan	12.081.000	12	Bulan	22.176.500	0	Bulan	-	-	Bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	0	Bulan	-	0,00	0,00	24	Bulan	12.081.000	50,00	13,85		
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	8	Dokumen	87.198.942	4	dokumen	12.081.000	2	dokumen	22.176.500		dokumen			dokumen			dokumen				0	dokumen	-	0,00	-	4	dokumen	12.081.000	50,00	13,85			
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaian	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaian	568	ASN	1.873.288.471	142	ASN	534.349.470	142	ASN	383.022.800	126	ASN	21.700.000	0	ASN	10.800.000	0	ASN	0	0	0	0	126	ASN	32.500.000	88,73	8,49	268	ASN	566.849.470	47,18	30,26		
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	296	steli	1.146.347.055	296	steli	342.626.800		steli	244.580.000		steli			steli			steli				0	steli	0	#DIV/0!	0,00	296	steli	342.626.800	100,00	29,89			
4 01 01 2.05 03	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jangka waktu pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jangka waktu pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	Bulan	110.593.779	24	Bulan	63.689.720		Bulan	29.482.100		Bulan	7.200.000		Bulan	7.200.000		Bulan					0	Bulan	14.400.000	#DIV/0!	48,84		78.089.720		70,61			
4 01 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jangka waktu sistem informasi kepegawaian yang dikelola Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jangka waktu sistem informasi kepegawaian yang dikelola Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24	Bulan	78.266.367	24	Bulan	32.141.350	0	Bulan	18.611.600		Bulan	3.600.000		Bulan	3.600.000		Bulan					0	Bulan	7.200.000	#DIV/0!	38,69		39.341.350		25,00			
4 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	kali	59.550.496	24	Kali	13.700.000	0	Kali	14.486.500		Kali	0		Kali			Kali					0	Kali	0	#DIV/0!	0,00		13.700.000		25,00			

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2021-2024			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sid Renja Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2023)			Realisasi Kinerja Pada Trwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sid Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5			6			7			8			9			10			11			12=9+10+11			12=11/6x100%		13=5+11			14=13x4/100%		
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal / Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal / Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	orang	85.072.138	7	Orang	31.900.000	2	Orang	12.000.000	1	Orang	4.900.000	Orang	Orang	Orang	Orang	1	Orang	4.900.000	50,00	40,83	8	Orang	36.800.000	40,00	43,26						
4 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	keg		4	keg	0	0	keg			keg			keg		keg	0	keg		#DIV/0!		4	keg		100,00							
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek / Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek / Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	600	orang	223.314.361			20.357.600	304	orang	51.862.600		orang	0	orang		orang	orang	0	orang	0	0,00	0,00	0	orang	20.357.600	0,00	9,12						
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48	Bulan	16.887.470.711	24	bulan	11.563.719.386	12	bulan	4.262.152.023	3	bulan	811.544.157	3	bulan	1.194.564.959	0	bulan	0	0	0	0	6	bulan	2.006.109.116	50,00	47,07	30	bulan	13.569.828.502	62,50	80,35	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2000	barang pakai habis		9.499	Barang pakai habis	0	0	Barang pakai habis			Barang pakai habis			Barang pakai habis		Barang pakai habis	0	Barang pakai habis	#DIV/0!		9.499	Barang pakai habis		474,95	28,11							
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	24	Paket	1.280.808.835			297.326.342	12	Paket	187.625.000	3	Paket	29.150.400	3	Paket	46.322.900		Paket		Paket		50,00		6	Paket	372.799.642	25,00						
4 01 01 2.06 04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10606	unit		9.930	Unit	0	0	Unit			Unit			Unit		Unit	0	Unit	#DIV/0!		9.930	Unit		93,63								
4 01 01 2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	Paket	787.002.345			357.392.548	12	Paket	224.578.800	3	Paket	29.556.200	3	Paket	72.974.500		Paket		Paket		50,00		6	Paket	459.923.248	25,00	58,44					
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka Waktu penyediaan bahan logistik kantor	Jangka Waktu penyediaan bahan logistik kantor	24	bulan	2.977.524.817	24	bulan	1.138.961.500	12	Paket	685.100.000	3	Paket	131.875.000	3	Paket	342.420.000		Paket		Paket		50,00		6	Paket	474.295.000	69,23		1.613.256.500	100,00	54,18		
4 01 01 2.06 07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	Paket				12	Paket				3	Paket			3	Paket		Paket		50,00		6	Paket		25,00							
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24	Paket	1.276.082.065	24	bulan	565.268.800	12	Paket	293.620.350	3	Paket	29.987.200	3	Paket	102.903.800		Paket		Paket		50,00		6	Paket	132.891.000	45,26		698.159.800	100,00	54,71		
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24	Paket		24	bulan	0	0	bulan			bulan			bulan		bulan	0	bulan	#DIV/0!		24	bulan		100,00								
4 01 01 2.06 10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24	Dokumen	212.680.344			157.545.000	12	Paket	60.000.000	3	Paket	18.305.000	3	Paket	22.230.000		Paket		Paket		50,00		6	Paket	40.535.000	67,56		198.080.000	100,00	93,14		
4 01 01 2.06 11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi	Jumlah tamu yang difasilitasi	1400	orang		14.322	Orang	-	0	Orang			Orang			Orang		Orang	0	Orang	#DIV/0!		14.322	Orang		1.023,00								
4 01 01 2.06 12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8	Laporan	7.460.919.625			7.139.131.133	4	Laporan	2.074.734.873		Laporan	323.482.354	2	Laporan	468.032.509		Laporan		Laporan		50,00		2	Laporan	791.514.863	38,15		7.930.645.996	25,00	106,30		
4 01 01 2.06 13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	24	bulan	2.892.452.680	24	bulan	1.908.094.063	0	bulan	736.493.000		bulan	249.188.003		bulan	139.681.250		bulan		bulan		50,00		6	Laporan	388.869.253	52,80		2.296.963.316	100,00	79,41		
4 01 01 2.06 14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan				12	Laporan			3	Laporan		3	Laporan			Laporan		Laporan		50,00		6	Laporan		25,00						

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2021-2024			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5			6			7			8		9			10			11			12=11/6x100%		13=5+11			14=13/4x100%					
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	572	Unit	3.201.718.841	162	Unit	2.013.933.000	62	Unit	868.748.700	1	Unit	307.400.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	0	1	Unit	307.400.000	1,61	35,38	163	Unit	2.321.333.000	28,50	72,50	
4 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan / Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Jumlah unit pengadaan kendaraan / Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	4	Unit	1.198.270.000	2	Unit	720.200.000	1	Unit	311.413.000	1	Unit	307.400.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	1	Unit	307.400.000	100,00	98,71	3	Unit	1.027.600.000	75,00	85,76	
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel / Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah unit pengadaan mebel / Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	172	unit	419.745.927	31	Unit	74.405.000	20	Unit	37.615.300	0	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	0	Unit	-	0,00	0,00	31	Unit	74.405.000	18,02	17,73	
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	unit	1.583.702.914	125	Unit	1.119.682.000	25	Unit	372.192.100	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	0	Unit	-	0,00	0,00	125	Unit	1.119.682.000	208,33	70,70	
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	4	unit	0	5	unit	34.700.000	0	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	0	unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5	unit	34.700.000	125,00	0,00		
4 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	unit	0	4	Unit	64.946.000	16	Unit	147.528.300	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	0	Unit	-	0,00	0,00	4	Unit	64.946.000	100,00	0,00		
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48	bulan	16.860.608.171	24	bulan	7.685.967.150	12	bulan	3.157.959.700	3	bulan	893.676.940	3	bulan	1.029.181.362	0	bulan	0	0	bulan	0	6	bulan	1.922.858.302	50,00	60,89	30	bulan	9.608.825.452	62,50	56,99
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	24	bulan	85.072.138	24	bulan	16.791.000	0	bulan	13.800.000	-	bulan	0	-	bulan	2.000.000	-	bulan	-	-	bulan	0	6	bulan	2.000.000	#DIV/0!	14,49	24	bulan	18.791.000	100,00	22,09
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	24	bulan	6.278.323.758	24	bulan	3.978.057.783	0	bulan	1.598.228.000	-	bulan	592.085.740	-	bulan	546.504.562	-	bulan	-	-	bulan	0	6	bulan	1.138.590.302	#DIV/0!	71,24	6	bulan	5.116.648.085	81,50	-
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	24	bulan	815.730.781	24	bulan	2.376.591.086	-	bulan	724.034.500	-	bulan	166.480.000	-	bulan	255.820.000	-	bulan	-	-	bulan	0	6	bulan	422.300.000	#DIV/0!	58,33	6	bulan	2.798.891.086	-	343,11
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	24	bulan	9.681.481.494	24	bulan	1.314.527.281	-	bulan	821.897.200	-	bulan	135.111.200	-	bulan	224.656.800	-	bulan	-	-	bulan	0	6	bulan	359.968.000	#DIV/0!	43,80	6	bulan	1.674.495.281	-	17,30

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2021-2024			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2023)			Realisasi Kinerja Pada Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				5			6			7			8		9		10		11		12=8+9+10+11			12=116x100%		13=5+11			14=134x100%								
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp		K	Rp				
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48	Bulan	13.311.748.690	24	Bulan	5.171.995.306	12	Bulan	2.682.561.850	3	Bulan	155.340.100	3	Bulan	375.793.094	0	Bulan	0	0	0	Bulan	0	6	Bulan	531.133.194	50,00	19,80	30	Bulan	5.703.128.590	62,50	42,84		
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48	unit	2.227.690.489	24	unit	658.110.485	10	unit	423.160.000	1	unit	3.950.000	3	unit	15.132.227																			
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara / Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara / Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	unit	2.608.898.738	29	unit	701.112.969	21	unit	389.890.000	3	unit	17.377.500	10	unit	63.294.467																			
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	820	unit	1.343.374.125	410	unit	608.379.000	184	unit	303.830.050	9	unit	13.130.000	32	unit	63.910.000																			
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12	unit	3.665.095.729	6	unit	1.292.458.972	3	unit	720.737.000		unit			unit																				
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jangka Waktu pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jangka Waktu pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	24	bulan		24	Bulan			Bulan			Bulan			Bulan																				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	3.466.689.609		unit	1.911.933.970	1	unit	844.944.800		unit	120.882.600		unit	233.456.400																			
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi dan Operasional KDH dan Wakil KDH	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi dan Operasional KDH dan Wakil KDH	48	bulan	3.988.579.107	24	bulan	2.022.151.710	12	bulan	1.000.806.733	3	bulan	261.511.209	3	bulan	294.372.805	0		0	0	0	0	6	bulan	555.884.014	50,00	55,54	30		2.578.035.724	62,50	64,64			
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan KDH dan Wakil KDH	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan KDH dan Wakil KDH	24	bulan		24	bulan			bulan			bulan			bulan																				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	Orang	762.407.914		Orang	350.179.710	2	Orang	180.000.000		Orang	37.711.209		Orang	49.772.805																			
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan Wakil KDH	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	40	strel		100	strel			strel			strel			strel																				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4	Paket	183.755.817		Paket	110.400.000	2	Paket	42.960.000		Paket	0		Paket	20.800.000																			

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2021-2024			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Aktif Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd RA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				5			6			7			8			9			10			11			12=9+10+11			12=11x100%		13=5+11			14=13x100%									
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan		Rp	K	Rp				
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jangka waktu penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan Wakil KDH Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jangka waktu penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan Wakil KDH Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	bulan		12	bulan			bulan			bulan		223.800.000			223.800.000				bulan			bulan		0	bulan		447.600.000			80,00		12	bulan		50,00			
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumah-tangga Sekretariat Daerah	Jangka waktu penyediaan kebutuhan Sekretariat Daerah	Jangka waktu penyediaan kebutuhan Sekretariat Daerah	48	Bulan	13.918.449.529	24	bulan	6.950.086.173	12	bulan	3.044.149.850	3	bulan	379.266.600	3	bulan	1.053.453.843	0	bulan	0	0	bulan	0	0	bulan	0	0	bulan	0	1.432.720.445			50,00	47,06	30	bulan		8.382.806.618	62,50	60,23	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jangka waktu penyediaan kebutuhan Rumah Tangga KDH dan Wakil KDH Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jangka waktu penyediaan kebutuhan Rumah Tangga KDH dan Wakil KDH Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	24	bulan		24	bulan			bulan			bulan		180.753.400			569.767.795				bulan			bulan		0	bulan		750.521.195			80,00	45,49	24	bulan		100,00	55,33		
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24	Paket			Paket		12	Paket		3	Paket		3	Paket			Paket			Paket			Paket		6	Paket							6	Paket		25,00			
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penyempurnaan laporan Reformasi Birokrasi	Penyempurnaan laporan Reformasi Birokrasi dibagi Target X 100	100,00	%	5.500.563.995	100	%	2.065.701.273,00	100,00	%	1.486.657.525,00	100,00	%	413.208.371		%	323.524.631,00	0,00	%	0,00	0,00	%	0,00	100,00	%	736.733.002	100,00	49,56	100,00	%	2.802.434.275	100,00	50,95								
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelembagaan Jumlah Dokumen Evaluasi Anjab dan ABK Jumlah Dokumen Formasi PNS (e-Formasi) Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Jumlah Dokumen Evaluasi jabatan Yang Dievaluasi Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelembagaan Jumlah Dokumen Evaluasi Anjab dan ABK Jumlah Dokumen Formasi PNS (e-Formasi) Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Jumlah Dokumen Evaluasi jabatan Yang Dievaluasi Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	Dok		2	Dok		0	Dok			Dok			Dok			Dok			Dok		0	Dok		0	Dok		375.778.041			59,43	2	Dok	1.113.358.539	69,51				
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis dan SOP Jumlah Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Jumlah Unit Kerja Yang Berpartisipasi pada kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Pontianak Jumlah Laporan SKM Unit Kerja dan Laporan SKM Pemerintah Kota Pontianak Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis dan SOP Jumlah Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Jumlah Unit Kerja Yang Berpartisipasi pada kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Pontianak Jumlah Laporan SKM Unit Kerja dan Laporan SKM Pemerintah Kota Pontianak Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	Dok		2	Dok			Dok			Dok			Dok			Dok			Dok		0	Dok		0	Dok		189.046.536			39,50	4	Laporan	933.706.347	178,00				
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan RB Kota Pontianak / Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan RB Kota Pontianak / Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4	Dok	253.897.795	2	Dok	83.853.484	1	Dok	124.624.450	1	Dok	24.550.000		Dok	23.586.600		Dok			Dok		1	Dok		48.136.600			100,00	38,63	3	Dok		131.990.084	75,00	51,99				
4 01 01 2.13 04	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Kepatuhan Unit Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 / Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Kepatuhan Unit Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 / Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4	Dok	1.763.093.844	2	Dok	117.518.359	1	Dok	71.689.625		Dok	0		Dok	32.831.525		Dok			Dok		0	Dok		32.831.525			0,00	45,80	2	Dok		150.349.884	50,00	8,43				

Kode	Usunan/Bidang Usunan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2021-2024			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2023)			Realisasi Kinerja Pada Trivuln								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENS1 s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5			6			7			8		9		10		11		12=9+10+11			12=11/6x100%		13=5+11			14=13/4x100%					
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K		Rp		
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP Kota Pontianak	Jumlah Dokumen LAKIP Kota Pontianak	2	Dok		2	Dok		1	Dok			Dok		Dok		Dok		Dok		0	Dok		0,00		2	Dok		100,00				
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Kota Pontianak	2	Dok		2	Dok		1	Dok			Dok		Dok		Dok		Dok		0	Dok		0,00		2	Dok		100,00	35,37			
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	6	Dok	1.337.391.792	4	Dok	382.089.121	1	Dok	179.480.900	1	Dok	60.202.600		Dok		Dok		Dok		1	Dok		90.940.300	50,67	5	Dok	473.029.421	83,33			
4 01 01 2.14	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	persentase penyenggaraan keprotokolan, (jumlah realisasi kegiatan yang difasilitasi dibagi penyebarluasan informasi dan hasil liputan kepala daerah	(jumlah realisasi kegiatan yang difasilitasi dibagi Jumlah target kegiatan) x 100	100,00	%	14.471.748.500	122	%	5.777.073.843	100,00	%	2.128.127.708	25,00	%	396.080.800	25,00	%	624.679.882	0,00	%	0	0,00	%	0	50,00	%	1.020.760.682	50,00	47,97	85,94	%	6.797.834.525	85,94	46,97
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	persentase layanan keprotokolan pemerintah daerah yang difasilitasi	persentase layanan keprotokolan pemerintah daerah yang difasilitasi	100	%		100	%			%			%			%				%	0	%		#DIV/0!		#DIV/0!	%		#DIV/0!				
		Jumlah kegiatan peringatan dan upacara hari-hari besar	Jumlah kegiatan peringatan dan upacara hari-hari besar	22	kegiatan		16	kegiatan			kegiatan			kegiatan			kegiatan				kegiatan		0	kegiatan		#DIV/0!		16	kegiatan		72,73			
		Jumlah kegiatan peringatan dan upacara hari ulang tahun Kemedekaan RI	Jumlah kegiatan peringatan dan upacara hari ulang tahun Kemedekaan RI	2	kegiatan		3	kegiatan			kegiatan			kegiatan			kegiatan				kegiatan		0	kegiatan		#DIV/0!		3	kegiatan		150,00			
		Jumlah layanan keprotokolan Kepala Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Jumlah layanan keprotokolan Kepala Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	224	kegiatan	3.212.312.858	2.161	kegiatan	1.149.689.582		kegiatan			kegiatan			kegiatan				kegiatan		0	kegiatan		#DIV/0!		2.161	kegiatan		964,73			
		Jumlah Layanan Keprotokolan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Non Departemen/ luar Negeri	Jumlah Layanan Keprotokolan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Non Departemen/ luar Negeri	96	kegiatan		5	kegiatan			kegiatan			kegiatan			kegiatan				kegiatan		0	kegiatan		#DIV/0!		5	kegiatan		5,21			
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	8	Laporan			Laporan		4	Laporan		1	Laporan		1	Laporan			Laporan		2	Laporan		50,00		2	Laporan		25,00				
		Persentase Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	Persentase Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	100	%		100	%			%			%			%			%		0	%		#DIV/0!		50	%		50,00				
		Jumlah kerjasama dengan mass media dalam bentuk dialog interaktif melalui media elektronik	Jumlah kerjasama dengan mass media dalam bentuk dialog interaktif melalui media elektronik	14	Kerjasama		20	Kerjasama			Kerjasama			Kerjasama			Kerjasama				Kerjasama		0	Kerjasama		#DIV/0!		20	Kerjasama		142,86			
		Jumlah penyebarluasan informasi hasil Pembangunan dan Kegiatan Pimpinan kepada Masyarakat	Jumlah penyebarluasan informasi hasil Pembangunan dan Kegiatan Pimpinan kepada Masyarakat	1200	halaman artikel	6.983.240.406	1.498	halaman artikel	1.690.562.890		halaman artikel			halaman artikel			halaman artikel				halaman artikel		0	halaman artikel		#DIV/0!	35,26	1.498	halaman artikel		1.972.405.723	124,83	28,24	
		Jumlah Penerbitan Majalah Warta Kota	Jumlah Penerbitan Majalah Warta Kota	8	Edisi		8	Edisi			Edisi			Edisi			Edisi				Edisi		0	Edisi		#DIV/0!		8	Edisi		100,00			
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan kerjasama dengan mass media melalui pemasangan iklan di media cetak dan elektronik	Jumlah kegiatan kerjasama dengan mass media melalui pemasangan iklan di media cetak dan elektronik	120	iklan		227	iklan			iklan			iklan			iklan			iklan		0	iklan		#DIV/0!		227	iklan		189,17				
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	8	Laporan			Laporan		4	Laporan		1	Laporan		1	Laporan			Laporan		2	Laporan		50,00		2	Laporan		25,00				
		Persentase pendokumentasian kegiatan kepala daerah	Persentase pendokumentasian kegiatan kepala daerah	100	%		100	%			%			%			%			%		0	%		#DIV/0!		50	%		50,00				
		Jumlah Fasilitasi Jumpa Pers	Jumlah Fasilitasi Jumpa Pers	24	kegiatan		24	kegiatan			kegiatan			kegiatan			kegiatan				kegiatan		0	kegiatan		#DIV/0!		24	kegiatan		100,00			
		Jumlah penyampaian informasi kegiatan Kepala Daerah kepada Masyarakat	Jumlah penyampaian informasi kegiatan Kepala Daerah kepada Masyarakat	296	66 keping CD dan 82 Balih, Spanduk, Benner	4.276.195.236	292	66 keping CD dan 82 Balih, Spanduk, Benner	2.936.821.281		66 keping CD dan 82 Balih, Spanduk, Benner			66 keping CD dan 82 Balih, Spanduk, Benner			66 keping CD dan 82 Balih, Spanduk, Benner				66 keping CD dan 82 Balih, Spanduk, Benner		0	66 keping CD dan 82 Balih, Spanduk, Benner		#DIV/0!	70,34	292	66 keping CD dan 82 Balih, Spanduk, Benner		3.497.393.121	98,65	81,79	
Jumlah kegiatan kerjasama dengan mass media	Jumlah kegiatan kerjasama dengan mass media	3504	publikasi		4.335	publikasi			publikasi			publikasi			publikasi				publikasi		0	publikasi		#DIV/0!		4.335	publikasi		123,72					
Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	8	Laporan			Laporan		4	Laporan		1	Laporan		1	Laporan				Laporan		2	Laporan		50,00		2	Laporan		25,00					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2021-2024			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				5			6			7			8		9			10			11			12=8+9+10+11			12=116x100%		13=5+11			14=13/4x100%							
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp		K	Satuan	Rp					
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah yang dikeluarkan oleh (Jumlah organisasi/lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi dibagi Jumlah organisasi/lembaga sosial masyarakat yang mengajukan permohonan fasilitas) x 100	71,74						71,74																													
		persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	(Jumlah Perangkat Daerah Yang memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK) / Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) X 100	100	%	67.506.862.208	%		25.355.020.625	%	100	%																											
		Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci (IKK)	(Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang mendapat pembinaan/Seluruh Jumlah Kecamatan dan Kelurahan) X 100	100,00	%						100	%																											
		Persentase pemenuhan laporan kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan	(Jumlah Realisasi laporan kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan dibagi Jumlah target kegiatan) x 100	100,00	%						100	%																											
		Persentase pemenuhan laporan pelaksanaan Rakernas APEKSI dan Muskomwil V Kalimantan	(Jumlah Realisasi laporan pelaksanaan Rakernas APEKSI dan Muskomwil V Kalimantan dibagi Jumlah target kegiatan) x 100	100,00	%	39.169.718.733	%		12.569.983.404	%	100	%																											
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan data dukung kinerja kunci	(Jumlah Perangkat Daerah Yang menyampaikan data dukung kinerja kunci / Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) X 100	100,00	%						100	%																											
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kecamatan dan kelurahan yang mendapatkan pembinaan	(Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang mendapat pembinaan/Seluruh Jumlah Kecamatan dan Kelurahan) X 100	100,00	%						100	%																											
		Persentase pemenuhan laporan kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan	(Jumlah Realisasi laporan kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan dibagi Jumlah target kegiatan) x 100	100,00	%						100	%																											
		Persentase pemenuhan laporan pelaksanaan Rakernas APEKSI dan Muskomwil V Kalimantan	(Jumlah Realisasi laporan pelaksanaan Rakernas APEKSI dan Muskomwil V Kalimantan dibagi Jumlah target kegiatan) x 100	100,00	%	39.169.718.733	%		12.569.983.404	%	100	%																											
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan data dukung kinerja kunci	(Jumlah Perangkat Daerah Yang menyampaikan data dukung kinerja kunci / Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) X 100	100,00	%						100	%																											
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang diberikan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang diberikan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	70	kec/kel					70	kec/kel																												
		Jumlah profil kelurahan yang dievaluasi	Jumlah profil kelurahan yang dievaluasi	58	Kel					58	Kel																												
		Jumlah pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang dievaluasi	Jumlah pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang dievaluasi	12	Kec	33.908.968.180			10.477.676.500		12	Kec																											
		Jumlah RT/RW yang mendapatkan pembekalan	Jumlah RT/RW yang mendapatkan pembekalan	6414	RT/RW					6.490	RT/RW																												
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6	Dok						6	Dok																											



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2021-2024			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2023)			Realisasi Kinerja Pada Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5			6			7			8		9		10		11		12=8+9+10+11			12÷11x100%		13=5+11			14=13x100%			
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp		K
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Laporan Kegiatan Pembakuan nama dan Inventarisasi rupa bumi Laporan Kegiatan koordinasi batas wilayah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Laporan Kegiatan Pembakuan nama dan Inventarisasi rupa bumi Laporan Kegiatan koordinasi batas wilayah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 2 4	Laporan Laporan Dok	 1.035.294.227  	2 2 4	Laporan Laporan Dok	 284.091.476  	 200.306.300  	 Laporan Laporan Dok	 2.880.000  	 Laporan Laporan Dok	 16.298.000  	 Laporan Laporan Dok	 Laporan Laporan Dok	 0 0 0	 Laporan Laporan Dok	 19.178.000  	 #DIV/0! #DIV/0! 0,00	 9,57  	 0 0 2	 Laporan Laporan Dok	 303.269.476  	 0,00 0,00 50,00	 29,29  						
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Penyampaian LPPD tepat waktu Penyampaian Laporan SPM tepat waktu Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Penyampaian LPPD tepat waktu Penyampaian Laporan SPM tepat waktu Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 2 6	Laporan Laporan Dok	 4.225.456.326  	2 2 6	Laporan Laporan Dok	 1.808.215.428  	 1.389.197.700  	 Laporan Laporan Dok	 162.091.935  	 Laporan Laporan Dok	 59.105.500  	 Laporan Laporan Dok	 0 0 1	 Laporan Laporan Dok	 221.197.435  	 #DIV/0! #DIV/0! 33,33	 15,92  	 0 0 Dok	 Laporan Laporan Dok	 2.029.412.863  	 0,00 0,00 0,00	 48,03  							
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan	[Jumlah organisasi/lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi dibagi Jumlah organisasi/lembaga sosial masyarakat yang mengajukan permohonan fasilitasi] x 100	100	%	22.302.044.499	100	%	10.283.877.170	100	%	8.996.517.900	5,56	%	241.979.650	66,67	%	4.320.072.000	0,00	%	0,00	%	72,22	%	4.562.051.650	72,22	175,86	%	14.845.928.820	71,92	66,57	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Jamaah Calon Haji Kota Pontianak yang difasilitasi Jumlah Petugas Keagamaan yang dibina Jumlah penyuluh agama Islam dan guru ngaji tradisional yang difasilitasi Jumlah Rumah Ibadah yang diberikan bantuan Hibah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Jamaah Calon Haji Kota Pontianak yang difasilitasi Jumlah Petugas Keagamaan yang dibina Jumlah penyuluh agama Islam dan guru ngaji tradisional yang difasilitasi Jumlah Rumah Ibadah yang diberikan bantuan Hibah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	1400 800 660 23 20	orang petugas keagamaan guru ngaji Rumah ibadah Dok	 10.799.350.651    	280 800 660 23 10	orang petugas keagamaan guru ngaji Rumah ibadah Dok	 6.353.132.591    	 6.342.013.300    	 orang petugas keagamaan guru ngaji Rumah ibadah Dok	 orang petugas keagamaan guru ngaji Rumah ibadah Dok	 orang petugas keagamaan guru ngaji Rumah ibadah Dok	 orang petugas keagamaan guru ngaji Rumah ibadah Dok	 orang petugas keagamaan guru ngaji Rumah ibadah Dok	 orang petugas keagamaan guru ngaji Rumah ibadah Dok	 0 0 0 0 7	 orang petugas keagamaan guru ngaji Rumah ibadah Dok	 2.800.938.450    	 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 70,00	 280 800 660 23 Dok	 orang petugas keagamaan guru ngaji Rumah ibadah Dok	 9.154.071.041    	 20,00 100,00 100,00 100,00 0,00	 84,77    							
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah petugas fardu kifayah yang difasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah petugas fardu kifayah yang difasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	460 4	orang Dok	 2.087.083.260  	460 2	Orang Dok	 919.278.749  	 679.248.200  	 Orang Dok	 Orang Dok	 Orang Dok	 Orang Dok	 Orang Dok	 Orang Dok	 0 2	 Orang Dok	 440.355.300  	 #DIV/0! 100,00	 64,83  	 460 Dok	 1.359.634.049  	 100,00 0,00	 65,15  							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2021-2024			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023(%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5			6			7			8			9			10			11			12=9+10+11			13=9+11			14=13/4*100%			
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K		Satuan	Rp
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerta Terkait Kesejahteraan Masyarakat	jumlah posyandu yang difasilitasi	jumlah posyandu yang difasilitasi	660	posyandu		646	posyandu			posyandu			posyandu			posyandu			0	posyandu			0	posyandu			0	posyandu			97,88		
		jumlah madrasah non formal yang difasilitasi	jumlah madrasah non formal yang difasilitasi	66	Madrasah Diniyah		74	Madrasah Diniyah			Madrasah Diniyah			Madrasah Diniyah			Madrasah Diniyah			0	Madrasah Diniyah			0	Madrasah Diniyah			0	Madrasah Diniyah			112,12		
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang diberikan Hibah	Jumlah Lembaga Masyarakat yang diberikan Hibah	2	Lembaga		2,00	Lembaga			Lembaga			Lembaga			Lembaga			0	Lembaga			0	Lembaga			0	Lembaga			100,00		
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	12	Dok	9.415.610.588		3.011.465.830		1.975.256.400		6.157.900		1.314.600.000							4	Dok			4	Dok			4	Dok			66,67	46,01
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah	(Jumlah realisasi penyusunan produk hukum daerah dibagi jumlah target penyusunan produk hukum daerah) x 100	100,00	%	5.033.289.483	71,32	%	2.241.293.551	100	%	1.257.272.240	20,96	%	211.310.336	51,38	%	302.397.800	0,00	%	0	0,00	%	0	72,34		513.708.136	72,34	40,86	102,77	%	2.795.001.687	102,77	54,74
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah penyusunan Raperda yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Jumlah penyusunan Raperda yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	30	Perda		32	Perda			Perda			Perda			Perda			0	Perda			0	Perda			0	Perda			106,67		
		Jumlah fasilitasi penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Jumlah fasilitasi penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	130	Perwa		282	Perwa			Perwa			Perwa			Perwa			0	Perwa			0	Perwa			0	Perwa			216,92		
		Jumlah monitoring efektivitas Perda sesuai dengan produk hukum yang efektif di masyarakat	Jumlah monitoring efektivitas Perda sesuai dengan produk hukum yang efektif di masyarakat	1200	SK	1.974.414.009		2.259	SK			SK			SK			SK			0	SK			0	SK			0	SK			188,25	
		Jumlah Raperda yang dibahas bersama dewan sesuai dengan BAPPEMPERDA	Jumlah Raperda yang dibahas bersama dewan sesuai dengan BAPPEMPERDA	50	Raperda	1.020.125.356		57	Raperda		492.869.300	Raperda		112.040.300		93.886.500		Raperda			0	Raperda			0	Raperda		205.926.800	41,78	57	Raperda	1.226.052.156	114,00	62,10
		Jumlah monitoring efektivitas Perda sesuai dengan produk hukum yang efektif di masyarakat	Jumlah monitoring efektivitas Perda sesuai dengan produk hukum yang efektif di masyarakat	100	Perda/Perwa		50	Perda/Perwa			Perda/Perwa			Perda/Perwa			Perda/Perwa			0	Perda/Perwa			0	Perda/Perwa			0	Perda/Perwa			50,00		
		Jumlah dokumen produk hukum yang dikaji	Jumlah dokumen produk hukum yang dikaji	16	Kajian		22	Kajian			Kajian			Kajian			Kajian			0	Kajian			0	Kajian			0	Kajian			137,50		
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1560	Dok			780	Dok			Dok			361	Dok			Dok			513	Dok			65,77		513	Dok			32,88		
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah pendampingan kasus hukum bagi pejabat daerah dan aparat / Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah pendampingan kasus hukum bagi pejabat daerah dan aparat / Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	20	Kasus	1.767.233.291	13	Kasus	713.964.990	5	Kasus	484.303.400	1	Kasus	53.813.500	1	Kasus	117.242.800			2	Kasus			171.056.300	35,32		15	Kasus	885.021.290	75,00	50,08		
		Jumlah kegiatan desiminasi penguatan institusi Ranham dan Pemasyarakatan	Jumlah kegiatan desiminasi penguatan institusi Ranham dan Pemasyarakatan	12	Kegiatan		10	Kegiatan			Kegiatan			0	Kegiatan			Kegiatan			0	Kegiatan			0	Kegiatan			10	Kegiatan			83,33	
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah bimtek penyusunan produk hukum daerah	Jumlah bimtek penyusunan produk hukum daerah	2	kegiatan		2	kegiatan			kegiatan			kegiatan			kegiatan			0	kegiatan			0	kegiatan			0	kegiatan			100,00		
		Jumlah kegiatan pelaksanaan Input pada sistem JDH	Jumlah kegiatan pelaksanaan Input pada sistem JDH	2	kegiatan		2	kegiatan			kegiatan			kegiatan			kegiatan			0	kegiatan			0	kegiatan			0	kegiatan			100,00		
		Jumlah kegiatan sosialisasi	Jumlah kegiatan sosialisasi	4	kegiatan	1.291.642.183		2	kegiatan	507.203.205		kegiatan		280.099.540		45.456.536		kegiatan		91.268.500			kegiatan			136.725.036		48,81	2	kegiatan	643.928.241	50,00	49,85	
		Jumlah penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat kelompok sadar hukum	Jumlah penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat kelompok sadar hukum	1200	Orang		1.200	Orang			Orang			Orang			Orang			0	Orang			0	Orang			0	Orang			100,00		
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100	Dok			50	Dok			22	Dok			67	Dok			89	Dok			178,00		89	Dok			89,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2021-2024			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2023(%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Aktif Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
				5			6			7			8			9			10			11			12=9+10+11				13=5+11			14=13/4x100%						
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp		K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Presentase kerjasama daerah yang difasilitasi Presentase kerjasama daerah yang dievaluasi	(Jumlah realisasi kerjasama daerah yang difasilitasi dibagi jumlah target kerjasama yang difasilitasi) x 100 (Jumlah realisasi kerjasama daerah yang dievaluasi dibagi jumlah target kerjasama yang dievaluasi) x 100	100,00	%	1.001.809.493	40	%	259.866.500	100,00	%	188.761.500	100	%	34.228.800	233	%	10.032.800	0	%	0	0	%	0	0	%	0	333,3333	%	44.261.600	333,33	23	90,00	%	304.128.100	90,00	30,36	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama daerah yang difasilitasi / Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama daerah yang difasilitasi / Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20	dok	1.001.809.493	8	dok	259.866.500	3	dok	188.761.500	3	dok	34.228.800	7	dok	10.032.800			dok			dok			dok	10	dok	44.261.600	333,33	23,45	18	dok	304.128.100	90,00	30,36	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	[(Persentase meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang difasilitasi + Persentase Fasilitas, Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi + persentase pemantauan terkait Sumber Daya Alam)/3 (jumlah rencana tender/seleksi-jumlah rencana pengadaan langsung)/(jumlah tender/seleksi yang diumumkan + jumlah rencana pengadaan langsung yang diumumkan) x 100	100	%	17.775.375.073	63,13	%	5.823.123.482	100,00	%	4.117.548.365	20,59	%	180.666.224	11,11	%	596.150.965	0	%	0	0	%	0	0	%	0	30,39	%	778.192.189	30,39	18,90	100,51	%	6.601.315.671,00	100,51	37,14	
4 01 03 2.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang difasilitasi	[(Persentase BUMD berkinerja baik + Persentase BLUD Berkinerja Baik + Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian dan sumber daya alam)/3	100,00	%	4.425.112.693	87,55	%	2.004.343.188	100,00	%	1.138.449.800	50,00	%	28.134.700	0,00	%	263.847.500	0,00	%	0	0,00	%	0	0	%	0	50	%	291.982.200	50,00	25,65	130,38	%	2.296.325.388	130,38	51,89	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Rapat-Rapat KPM Yang Difasilitasi Jumlah regulasi / petunjuk teknis yang disusun Jumlah tersedianya analisa kinerja BUMD, kebijakan KPM dan Pembinaan BUMD/BLUD Fasilitasi Tim Sekretariat untuk pelaksanaan Seleksi Direksi/Dewan Pengawas	Jumlah Rapat Koordinasi dan Rapat-Rapat KPM Yang Difasilitasi Jumlah regulasi / petunjuk teknis yang disusun Jumlah tersedianya analisa kinerja BUMD, kebijakan KPM dan Pembinaan BUMD/BLUD Fasilitasi Tim Sekretariat untuk pelaksanaan Seleksi Direksi/Dewan Pengawas	18	Rapat	1.687.309.248	20	Rapat	576.522.360		Rapat	490.632.700		Rapat	5.669.000		Rapat	135.470.000		Rapat			Rapat		0	Rapat	141.139.000	#DIV/0!	20	Rapat	717.661.360	111,11						
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Analisis/Kebijakan	1.687.309.248	24	Analisis/Kebijakan	576.522.360		Analisis/Kebijakan	490.632.700		Analisis/Kebijakan	5.669.000		Analisis/Kebijakan	135.470.000		Analisis/Kebijakan			Analisis/Kebijakan		0	Analisis/Kebijakan	141.139.000	#DIV/0!	24	Analisis/Kebijakan	717.661.360	600,00	42,53					
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3	Kegiatan	1.687.309.248	8	Kegiatan	576.522.360		Kegiatan	490.632.700		Kegiatan	5.669.000		Kegiatan	135.470.000		Kegiatan			Kegiatan		0	Kegiatan	141.139.000	#DIV/0!	8	Kegiatan	717.661.360	266,67						
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dok	1.687.309.248	2	Dok	576.522.360		Dok	490.632.700		Dok	5.669.000		Dok	135.470.000		Dok			Dok		2	Dok	141.139.000	100,00	2	Dok	717.661.360	50,00						
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan distribusi perekonomian yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Pengendalian Inflasi Kota Pontianak Jumlah Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan distribusi perekonomian yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Pengendalian Inflasi Kota Pontianak Jumlah Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	48	Bulan	1.001.766.957	44	Bulan	831.191.433		Bulan	295.750.300		Bulan	10.723.600		Bulan	78.392.500		Bulan			Bulan		0	Bulan	89.116.100	#DIV/0!	44	Bulan	920.307.533	91,67						
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Kebijakan Pengendalian Inflasi Kota Pontianak	Jumlah Kebijakan Pengendalian Inflasi Kota Pontianak	6	kebijakan	1.001.766.957	6	kebijakan	831.191.433		kebijakan	295.750.300		kebijakan	10.723.600		kebijakan	78.392.500		kebijakan			kebijakan		0	kebijakan	89.116.100	#DIV/0!	6	kebijakan	920.307.533	100,00	91,87					
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah	Jumlah Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah	3	kebijakan	1.001.766.957	3	kebijakan	831.191.433		kebijakan	295.750.300		kebijakan	10.723.600		kebijakan	78.392.500		kebijakan			kebijakan		0	kebijakan	89.116.100	#DIV/0!	3	kebijakan	920.307.533	100,00						
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	Laporan	1.001.766.957	1	Laporan	831.191.433		Laporan	295.750.300		Laporan	10.723.600		Laporan	78.392.500		Laporan			Laporan		0	Laporan	89.116.100	0,00	0	Laporan	920.307.533	0,00						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2021-2024			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2023)			Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Aktir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penganggung Jawab		
				5			6			7			8		9			10			11			12=9+10+11		12=11x100%		13=5+11				14=13x100%	
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp		K	Rp
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Percepatan Pemulihan Ekonomi Kota Pontianak Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Percepatan Pemulihan Ekonomi Kota Pontianak Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	16 kali monitoring/Bulan	29 kali monitoring/Bulan	278.012.094	3 kebijakan	278.012.094	kebijakan	213.454.800	kebijakan	3.377.500	kebijakan	45.530.000	kebijakan	kebijakan	kebijakan	kebijakan	kebijakan	kebijakan	kebijakan	0 kali monitoring/Bulan	48.907.500	#DIV/0!	22,91	29 kali monitoring/Bulan	326.919.594	181,25	32,40				
4 01 03 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD yang difasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD yang difasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	20 kali Rapat	28 kali Rapat	88.988.400	2 Kebijakan	88.988.400	Kebijakan	72.968.600	Kebijakan	6.989.600	kebijakan	2.035.000	kebijakan	kebijakan	kebijakan	kebijakan	kebijakan	kebijakan	kebijakan	0 kali Rapat	9.024.600	#DIV/0!	12,37	28 kali Rapat	98.013.000	140,00	23,14				
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD yang difasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD yang difasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	20 kali Rapat	31 kali Rapat	229.628.901	1 Kebijakan	229.628.901	Kebijakan	65.643.400	Kebijakan	1.375.000	kebijakan	2.420.000	kebijakan	kebijakan	kebijakan	kebijakan	kebijakan	kebijakan	kebijakan	0 kali Rapat	3.795.000	#DIV/0!	5,78	31 kali Rapat	233.423.901	155,00	76,93				
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi dan diterbitkan	Realisasi Kinerja penerbitan dokumen kebijakan standar harga satuan (ASB/HSPK dan Standar Biaya Umum) / target penerbitan dokumen kebijakan standar harga satuan (ASB/HSPK dan Standar Biaya Umum) x 100	100,00 %	4.116.579.937	61,22 %	1.569.625.119	100,00 %	1.010.933.875	11,76 %	38.040.550	33,33 %	112.954.825	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	41,18 %	150.995.375	41,18	14,94	112,07 %	1.720.620.494	112,07	41,80				
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah rapat kebijakan pembangunan yang difasilitasi Jumlah Peraturan Walikota tentang Standar Biaya yang diterbitkan Jumlah Revisi Peraturan Walikota tentang Standar Biaya yang diterbitkan Jumlah Analisa Standar Belanja untuk Penyusunan APBD yang ditambahkan Jumlah terfasilitasinya pemutakhiran sistem informasi pengendalian pembangunan	Jumlah rapat kebijakan pembangunan yang difasilitasi Jumlah Peraturan Walikota tentang Standar Biaya yang diterbitkan Jumlah Revisi Peraturan Walikota tentang Standar Biaya yang diterbitkan Jumlah Analisa Standar Belanja untuk Penyusunan APBD yang ditambahkan Jumlah terfasilitasinya pemutakhiran sistem informasi pengendalian pembangunan	80 rapat	112 rapat	1.682.920.259	4 Perwa	1.682.920.259	Perwa	577.175.350	Perwa	15.290.275	Perwa	67.630.475	Perwa	Perwa	Perwa	Perwa	Perwa	Perwa	Perwa	0 rapat	82.920.750	#DIV/0!	14,37	112 rapat	1.146.412.581	140,00	68,12				
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah kebijakan pengendalian dan evaluasi program pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah kebijakan pengendalian dan evaluasi program pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 dok	1 dok	1.097.179.459	2 dok	1.097.179.459	dok	164.516.025	dok	16.733.175	dok	13.962.850	dok	dok	dok	dok	dok	dok	dok	0 dok	30.696.025	#DIV/0!	18,66	1 dok	66.444.425	50,00	6,06				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2021-2024			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Anggaran RPKD yang dievaluasi Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	I				II				III				IV				12+4+10+11			12+11/6x100%		13+5+11			14+13/4x100%		
													K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp		K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan penyertaan anggaran pemerintah daerah Kota Pontianak	Jumlah laporan penyertaan anggaran pemerintah daerah Kota Pontianak	8	dok		8	dok		dok		dok		dok		dok		dok		dok		dok		0	dok		#DIV/0!	8	dok		100,00								
		Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan	8	kali		5	kali		kali		kali		kali		kali		kali		kali		kali		0	kali		#DIV/0!	5	kali		62,50								
		Jumlah terpeliharanya dan tertutakhirnya sistem e-progress Kota Pontianak	Jumlah terpeliharanya dan tertutakhirnya sistem e-progress Kota Pontianak	2	Sistem	1.336.480.219	2	Sistem	470.384.888		Sistem	269.242.500		Sistem	6.017.100		Sistem	31.361.500		Sistem		Sistem		0	Sistem		#DIV/0!	2	Sistem		100,00		37,99						
		Jumlah kebijakan yang difasilitasi melalui rapat koordinasi	Jumlah kebijakan yang difasilitasi melalui rapat koordinasi	40	rapat		40	rapat		rapat		rapat		rapat		rapat		rapat		rapat		rapat		0	rapat		#DIV/0!	40	rapat		100,00								
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16	Laporan			Laporan		8	Laporan		1	Laporan		2	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		3	Laporan		#DIV/0!	3	Laporan		18,75							
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	(Jumlah realisasi kegiatan (pengelolaan pengadaan barang dan jasa dibagi Jumlah target kegiatan) x 100	100,00	%	8.616.302.618	36,90	%	2.118.257.077	100,00	%	1.897.303.240	26,67	%	113.194.174	29,33	%	219.348.640	0,00	%	0	0,00	%	0	56,00	%	332.542.814	56,00	17,53	78,95	%	2.450.799.891	78,95	28,44					
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan proses pengadaan barang/jasa / Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan proses pengadaan barang/jasa / Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	240	paket	1.317.814.065	175	paket	311.945.541	105	Dok	292.685.800	12	Dok	27.000.000	27	Dok	31.400.000		Dok		Dok		39	Dok	58.400.000	37,14	19,95	214	Dok	370.345.541	89,17	28,10						
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah pemeliharaan sistem pengadaan secara elektronik	Jumlah pemeliharaan sistem pengadaan secara elektronik	4	aplikasi	1.293.120.075		aplikasi	824.443.444		aplikasi	291.243.100		aplikasi	41.759.000		aplikasi	53.374.000		aplikasi		aplikasi		0	aplikasi		#DIV/0!	4	aplikasi		100,00								
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90	Dok			Dok		45	Dok		28	Dok		17	Dok			Dok		Dok		45	Dok		100,00	45	Dok		50,00								
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	8	kali	6.005.368.478		kali	981.868.092		kali	1.313.374.340		kali	44.435.174		kali	134.574.640		kali		kali		0	kali		#DIV/0!	7	kali		87,50								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	700	Dok			Dok		350	Orang		150	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		150	Orang		42,86	150	Orang		21,43								
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	persentase pemantauan terkait Sumber Daya Alam	(Jumlah kebijakan sumber daya alam yang terrealisasi dibagi Jumlah kebijakan sumber daya alam yang di rencanakan) x 100	100,00	%	617.379.825	40,63	%	130.898.098	100,00	%	70.861.450	0	%	1.296.800	0	%	1.375.000	0	%	0	0	%	0	0,00	%	2.671.800	0,00	3,77	59,09	%	133.569.898	59,09	21,63					
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi	8	Bulan		5	Bulan			Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		0	Bulan		#DIV/0!	5	Bulan		62,50									
		Jumlah Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Yang Dihasilkan	Jumlah Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Yang Dihasilkan	1	kebijakan	349.178.589		kebijakan	93.052.201		kebijakan	26.102.150		kebijakan	1.296.800		kebijakan	1.375.000		kebijakan		kebijakan		0	kebijakan		#DIV/0!	1	kebijakan		27,41								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2	Dok			Dok		1	Dok			Dok		Dok		Dok		Dok		Dok		0	Dok		#DIV/0!		Dok										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2021-2024			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (Anggaran Murni 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																									
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	I		II		III		IV		K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		K	Rp																							
													K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan														Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp				
4.1.3.2.04.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	Dok			Dok		1	Dok	22.305.400	Dok	0	Dok	0	Dok	Dok	0	Dok	0	0	Dok	0	0	Dok	0	Dok									15																			
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	8	Bulan			6	Bulan		Bulan			Bulan		Bulan	Bulan	Bulan	0	Bulan			#DIV/0!		6	Bulan												75,00																		
		Jumlah Kebijakan Energi dan Air Yang Dihasilkan	Jumlah Kebijakan Energi dan Air Yang Dihasilkan	1	kebijakan	268.201.236		1	kebijakan	37.845.897		kebijakan	22.453.900		0	kebijakan	0	kebijakan	kebijakan	0	kebijakan	0		#DIV/0!	0,00	1	kebijakan												14,11																	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2	Dok			Dok		1	Dok		Dok			Dok		Dok	Dok	Dok	0	Dok			0,00		0	Dok																												
				100%		276.361.539.945			115.822.794.574			56.685.331.986			8.863.293.764			16.370.227.883			0		0																																	
				Jumlah Anggaran Dan Realisasi Program																																																				
							Rata-rata Capaian Kinerja(%)						31,41			15,64			35,24			26,88			#####			0,00			#DIV/0!			0,00			61,88%			44,52			61,88			44,52			68,91			51,04				
				Predikat Kinerja			Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah			Rendah			Sangat Rendah			Rendah			Sangat Rendah			Rendah			Rendah																

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### 3.1. Rencana Kerja

Adapun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp. 21.877.107.000,- atau bertambah sebesar Rp. 2.413.725.013,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 19.463.381.987,- dikarenakan berdasarkan pagu belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rancangan akhir RKPD perubahan Kota Pontianak Tahun 2023, penambahan terkait TPP ASN dan TPP PPPK.
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD dianggarkan sebesar Rp. 1.391.616.705,- atau berkurang sebesar Rp. 185.720.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.577.336.705,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
3. Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dianggarkan sebesar Rp. 177.280.000,- atau berkurang sebesar Rp. 67.300.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 244.580.000,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp. 239.578.800,- atau bertambah sebesar Rp. 15.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 224.578.800,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 318.620.350,- atau bertambah sebesar Rp. 25.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 293.620.350,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dianggarkan sebesar Rp. 2.016.625.373,- atau berkurang sebesar Rp. 58.082.500,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.074.734.873,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
7. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dianggarkan sebesar Rp. 307.413.000,- atau berkurang sebesar Rp. 4.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 311.413.000,- dikarenakan penyesuaian anggaran dan target kinerja juga disesuaikan dari 3 unit menjadi 1 unit

8. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 213.532.100,- atau berkurang sebesar Rp. 158.660.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 372.192.100,- sehingga target juga berubah yang semula 25 unit menjadi 11 unit dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
9. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 127.528.300,- atau berkurang sebesar Rp. 20.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 147.528.300,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dianggarkan sebesar Rp. 1.648.228.000,- atau bertambah sebesar Rp. 50.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.598.228.000,- dikarenakan adanya kenaikan biaya penggunaan daya listrik
11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp. 904.034.500,- atau bertambah sebesar Rp. 180.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 724.034.500,- dikarenakan penyesuaian anggaran
12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan dianggarkan sebesar Rp. 381.260.000,- atau berkurang sebesar Rp. 41.900.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 423.160.000,- sehingga target juga berubah yang semula 210 unit menjadi 9 unit dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan dianggarkan sebesar Rp. 355.750.000,- atau berkurang sebesar Rp. 34.140.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 389.890.000,- sehingga target juga berubah yang semula 21 unit menjadi 20 unit dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
14. Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 328.830.050,- atau bertambah sebesar Rp. 25.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 303.830.050,- dikarenakan penyesuaian anggaran
15. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 690.737.000,- atau berkurang sebesar Rp. 30.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 720.737.000,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
16. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 875.944.800,- atau bertambah sebesar Rp. 31.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 844.944.800,- dikarenakan penyesuaian anggaran



17. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.689.803.350,- atau bertambah sebesar Rp. 40.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.649.803.350,- dikarenakan penyesuaian anggaran
18. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.434.346.500,- atau bertambah sebesar Rp. 40.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.394.346.500,- dikarenakan penyesuaian anggaran
19. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dianggarkan sebesar Rp. 610.841.050,- atau berkurang sebesar Rp. 21.411.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 632.252.050,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
20. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dianggarkan sebesar Rp. 447.727.600,- atau berkurang sebesar Rp. 30.874.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 478.601.600,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
21. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp. 162.752.900,- atau berkurang sebesar Rp. 16.737.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 179.489.900,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
22. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dianggarkan sebesar Rp. 759.067.943,- atau berkurang sebesar Rp. 40.200.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 799.267.943,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
23. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dianggarkan sebesar Rp. 837.107.400,- atau bertambah sebesar Rp. 40.200.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 796.907.400,- dikarenakan penyesuaian anggaran
24. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dianggarkan sebesar Rp. 247.549.200,- atau berkurang sebesar Rp. 57.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 304.549.200,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
25. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.331.597.700,- atau berkurang sebesar Rp. 57.600.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.389.197.700,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
26. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dianggarkan sebesar Rp. 6.025.013.300,- atau berkurang sebesar Rp. 317.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.342.013.300,- dikarenakan Kota Pontianak tidak mengirimkan pendamping haji (TPHD) sehingga anggaran untuk Pendamping Haji (TPHD) dan Bimtek di refocusing atau disesuaikan

27. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 672.348.200,- atau berkurang sebesar Rp. 6.900.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 679.248.200,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
28. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp. 1.929.456.400,- atau berkurang sebesar Rp. 45.800.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.975.256.400,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
29. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dianggarkan sebesar Rp. 471.309.300,- atau berkurang sebesar Rp. 21.560.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 492.869.300,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
30. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dianggarkan sebesar Rp. 469.303.400,- atau berkurang sebesar Rp. 15.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 484.303.400,- sehingga target juga berubah yang semula 5 kasus menjadi 1 kasus dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
31. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dianggarkan sebesar Rp. 258.099.540,- atau berkurang sebesar Rp. 22.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 280.099.540,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran, dan target bertambah yang semula 50 dokumen menjadi 120 dokumen.
32. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dianggarkan sebesar Rp. 485.627.700,- atau berkurang sebesar Rp. 5.005.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 490.632.700,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran, dan target bertambah yang semula 2 dokumen menjadi 6 dokumen
33. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dianggarkan sebesar Rp. 250.599.300,- atau berkurang sebesar Rp. 45.151.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 295.750.300,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
34. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dianggarkan sebesar Rp. 206.546.800,- atau berkurang sebesar Rp. 6.908.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 213.454.800,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
35. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD dianggarkan sebesar Rp. 27.943.600,- atau berkurang sebesar Rp. 45.025.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 72.968.600,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran

36. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dianggarkan sebesar Rp. 487.175.350,- atau berkurang sebesar Rp. 90.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 577.175.350,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
37. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 1.159.374.340,- atau berkurang sebesar Rp. 154.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.313.374.340,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran

Adapun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																				
4	01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>											56,685,331,986	57,966,983,499			72,471,905,641					
4	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											40,231,178,781	42,364,529,294			52,564,477,185				
4	01	01	2.0	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											122,301,400	122,301,400			142,566,526			
4	01	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	23,385,800	23,385,800	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	54,507,331
4	01	01	2.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	30,000,000	30,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	30,000,000
4	01	01	2.0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	24,153,900	24,153,900	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	29,579,970
4	01	01	2.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	10 Laporan	10 Laporan	19 Dokumen	19 Dokumen	44,761,700	44,761,700	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	28,479,225
4	01	01	2.0	2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											21,072,513,992	23,300,519,005			26,292,014,721		
4	01	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	142 Orang/bulan	142 Orang/bulan	12 Bulan	12 Bulan	19,463,381,987	21,877,107,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	24,441,300,000

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
4 01 01 2 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	1,577,336,705	1,391,616,705	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	1,824,332,711
4 01 01 2 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	31,795,300	31,795,300	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	26,382,010
4 01 01 2 03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>											22,176,500	22,176,500			24,427,787		
4 01 01 2 03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	12 bulan	12 bulan	22,176,500	22,176,500	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	24,427,787
4 01 01 2 05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											383,022,800	315,722,800			524,780,369		
4 01 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	142 ASN	142 ASN	244,580,000	177,280,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	321,136,036
4 01 01 2 05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya		100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	142 ASN	142 ASN	29,482,100	29,482,100	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	30,981,584
4 01 01 2 05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya		100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	142 ASN	142 ASN	18,611,600	18,611,600	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	21,925,428

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	142 ASN	142 ASN	14,486,500	14,486,500	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	16,682,391			
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya		100 %	100 %	2 Orang	2 Orang	142 ASN	142 ASN	12,000,000	12,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	23,831,987			
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya		100 %	100 %	304 Orang	304 Orang	142 ASN	142 ASN	51,862,600	51,862,600	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	62,558,968			
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya		100 %	100 %	2 Orang	2 Orang	142 ASN	142 ASN	12,000,000	12,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	47,663,975			
4.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											4,262,152,023	4,244,069,523			4,832,965,577				
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	12 Bulan	12 Bulan	187,625,000	187,625,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	433,937,482			
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	12 Bulan	12 Bulan	224,578,800	239,578,800	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	220,469,719			
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	12 Bulan	12 Bulan	685,100,000	685,100,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	834,119,574			

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4 01 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	12 Bulan	12 Bulan	293,620,350	318,620,350	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	357,479,817
4 01 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	60,000,000	60,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	59,579,969
4 01 01 2.0 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	2,074,734,873	2,016,652,373	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	2,117,091,430
4 01 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	736,493,000	736,493,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	810,287,586
4 01 01 2.0 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>868,748,700</b>	<b>686,088,700</b>			<b>761,243,313</b>		
4 01 01 2.0 7 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	3 Unit	1 Unit	61 Unit	61 Unit	311,413,000	307,413,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	100,000,000
4 01 01 2.0 7 05	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	20 Unit	20 Unit	61 Unit	61 Unit	37,615,300	37,615,300	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	117,587,028

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4	01	01	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	25 Unit	11 Unit	61 Unit	61 Unit	372,192,100	213,532,100	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	443,656,285
4	01	01	2.0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	16 Unit	16 Unit	61 Unit	61 Unit	147,528,300	127,528,300	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	100,000,000
4	01	01	2.0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										3,157,959,700	3,370,409,700					4,723,306,831	
4	01	01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	13,800,000	13,800,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	23,831,987
4	01	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	1,598,228,000	1,630,678,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	1,758,800,703
4	01	01	2.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	724,034,500	904,034,500	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	228,517,662
4	01	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	821,897,200	821,897,200	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	2,712,156,479
4	01	01	2.0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										2,682,561,850	2,632,521,850					3,841,175,755	



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4 01 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	10 Unit	9 Unit	12 Bulan	12 Bulan	423,160,000	381,260,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	624,062,050		
4 01 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	21 Unit	20 Unit	12 Bulan	12 Bulan	389,890,000	355,750,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	730,853,188		
4 01 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	184 Unit	184 Unit	12 Bulan	12 Bulan	303,830,050	328,830,050	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	376,330,920		
4 01 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	12 Bulan	12 Bulan	720,737,000	690,737,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	1,138,776,093		
4 01 01 2.0 9 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	844,944,800	875,944,800	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	971,153,504		
4 01 01 2.1 1	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>											<b>1,000,806,733</b>	<b>1,000,806,733</b>				<b>1,117,355,166</b>			
4 01 01 2.1 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	12 Bulan	12 Bulan	180,000,000	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	213,579,870		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4 01 01 2.1 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	12 Bulan	12 Bulan	42,960,000	42,960,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	51,477,093		
4 01 01 2.1 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	12 Bulan	12 Bulan	777,846,733	777,846,733	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	852,298,203		
4 01 01 2.1 2	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>											<b>3,044,149,850</b>	<b>3,124,149,850</b>			<b>5,543,726,224</b>				
4 01 01 2.1 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jangka waktu penyediaan kebutuhan Sekretariat Daerah		100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	12 Bulan	12 Bulan	1,649,803,350	1,689,803,350	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	3,899,094,689		
4 01 01 2.1 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jangka waktu penyediaan kebutuhan Sekretariat Daerah		100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	12 Bulan	12 Bulan	1,394,346,500	1,434,346,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	1,644,631,535		
4 01 01 2.1 3	<b>Penataan Organisasi</b>											<b>1,486,657,525</b>	<b>1,417,635,525</b>			<b>1,525,634,031</b>				
4 01 01 2.1 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi		80,74 .	80,74 .	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	632,252,050	610,841,050	Pendapatan Bagi Hasil		Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	80,74 .	448,676,452		
4 01 01 2.1 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi		80,74 .	80,74 .	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	478,601,600	447,727,600	Pendapatan Bagi Hasil		Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	80,74 .	146,948,752		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4 01 01 2.1 3 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi		80,74 .	80,74 .	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	124,624,450	124,624,450	Pendapatan Bagi Hasil		Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	80,74 .	71,126,567
4 01 01 2.1 3 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi		80,74 .	80,74 .	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	71,689,525	71,689,525	Pendapatan Bagi Hasil		Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	80,74 .	555,541,093
4 01 01 2.1 3 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi		80,74 .	80,74 .	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	179,489,900	162,752,900	Pendapatan Bagi Hasil		Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	80,74 .	303,341,167
4 01 01 2.1 4	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>											2,128,127,708	2,128,127,708			3,235,280,885		
4 01 01 2.1 4 01	Fasilitasi Keprotokolan	persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	persentase penyelenggaraan keprotokolan, penyebarluasan informasi dan hasil liputan kepala daerah		100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	531,952,365	531,952,365	Pendapatan Bagi Hasil		persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100 %	899,892,763
4 01 01 2.1 4 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	persentase penyelenggaraan keprotokolan, penyebarluasan informasi dan hasil liputan kepala daerah		100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	799,267,943	759,067,943	Pendapatan Bagi Hasil		persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100 %	1,137,460,861
4 01 01 2.1 4 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	persentase penyelenggaraan keprotokolan, penyebarluasan informasi dan hasil liputan kepala daerah		100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	796,907,400	837,107,400	Pendapatan Bagi Hasil		persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100 %	1,197,927,261
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>											12,336,604,840	11,830,994,840			14,775,742,675		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024																																																																				
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																																															
								Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Target																																																																
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																																																																						
4.01.02.1	Administrasi Tata Pemerintahan													1,894,053,200	1,779,453,200				7,980,573,063																																																																
4.01.02.1.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	persentase organisasi/ lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Presentase kecamatan dan kelurahan yang mendapatkan pembinaan, Persentase pemenuhan laporan kegiatan pengelolaan administrasi pemerintahan, kewilayahan, Persentase pemenuhan laporan pelaksanaan Rakernas APEKSI dan Muskomwil V Kalimantan, Persentase perangkat daerah yang menyampaikan data dukung kinerja kunci																						100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %					304,549,200	247,549,200	Pendapatan Bagi Hasil	persentase organisasi/ lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100 %	6,483,261,767	4.01.02.1.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	persentase organisasi/ lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Presentase kecamatan dan kelurahan yang mendapatkan pembinaan, Persentase pemenuhan laporan kegiatan pengelolaan administrasi pemerintahan, kewilayahan, Persentase pemenuhan laporan pelaksanaan Rakernas APEKSI dan Muskomwil V Kalimantan, Persentase perangkat daerah yang menyampaikan data dukung kinerja kunci																						100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %					200,306,300	200,306,300	Pendapatan Bagi Hasil	persentase organisasi/ lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100 %	290,025,854
					100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %					304,549,200	247,549,200	Pendapatan Bagi Hasil	persentase organisasi/ lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100 %	6,483,261,767																																																															
4.01.02.1.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	persentase organisasi/ lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Presentase kecamatan dan kelurahan yang mendapatkan pembinaan, Persentase pemenuhan laporan kegiatan pengelolaan administrasi pemerintahan, kewilayahan, Persentase pemenuhan laporan pelaksanaan Rakernas APEKSI dan Muskomwil V Kalimantan, Persentase perangkat daerah yang menyampaikan data dukung kinerja kunci																						100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %					200,306,300	200,306,300	Pendapatan Bagi Hasil	persentase organisasi/ lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100 %	290,025,854																																										
					100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %					200,306,300	200,306,300	Pendapatan Bagi Hasil	persentase organisasi/ lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100 %	290,025,854																																																															

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 01 02 2.0 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Presentase kecamatan dan kelurahan yang mendapatkan pembinaan, Persentase pemenuhan laporan kegiatan pengelolaan administrasi pemerintahan, kewilayahan, Persentase pemenuhan laporan pelaksanaan Rakernas APEKSI dan Muskomwil V Kalimantan, Persentase perangkat daerah yang menyampaikan data dukung kinerja kunci		100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	1,389,197,700	1,331,597,700	Pendapatan Bagi Hasil		persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100 %	1,207,285,442
4 01 02 2.0 2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat										8,996,517,900	8,664,067,900				5,104,505,556		
4 01 02 2.0 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan		100 %	100 %	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	100 %	6,342,013,300	6,062,263,300	Pendapatan Bagi Hasil		persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100 %	3,025,314,758

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 01 02 2.0 2 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Persentase terlaksananya fasilitas kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	679,248,200	672,348,200	Pendapatan Bagi Hasil		persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100 %	584,672,541
4 01 02 2.0 2 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Persentase terlaksananya fasilitas kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan		100 %	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	1,975,256,400	1,929,456,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil		persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100 %	1,494,518,257
4 01 02 2.0 3	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>										<b>1,257,272,240</b>	<b>1,198,712,240</b>					<b>1,410,018,568</b>	
4 01 02 2.0 3 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Persentase produk hukum daerah		71.74 .	71.74 .	780 Dokumen	780 Dokumen	100 %	100 %	492,869,300	471,309,300	Pendapatan Bagi Hasil		Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah	71.74 .	553,109,537
4 01 02 2.0 3 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase produk hukum daerah		71.74 .	71.74 .	5 Kasus	1 Kasus	100 %	100 %	484,303,400	469,303,400	Pendapatan Bagi Hasil		Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah	71.74 .	495,070,224

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 01 02 2.0 3 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Persentase produk hukum daerah		71.74 .	71.74 .	50 Dokumen	120 Dokumen	100 %	100 %	280,099,540	258,099,540	Pendapatan Bagi Hasil		Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah	71.74 .	361,838,807
4 01 02 2.0 4	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>										<b>188,761,500</b>	<b>188,761,500</b>				<b>280,645,488</b>		
4 01 02 2.0 4 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Kerjasama Daerah Yang Difasilitasi		100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	188,761,500	188,761,500	Pendapatan Bagi Hasil		persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100 %	280,645,488
4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>										<b>4,117,548,365</b>	<b>3,771,459,365</b>				<b>5,131,685,781</b>		
4 01 03 2.0 1	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>										<b>1,138,449,800</b>	<b>1,036,360,800</b>				<b>1,216,942,649</b>		
4 01 03 2.0 1 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang difasilitasi		100 %	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	490,632,700	485,627,700	Pendapatan Bagi Hasil		persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	449,978,283
4 01 03 2.0 1 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang difasilitasi		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	295,750,300	250,599,300	Pendapatan Bagi Hasil		persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	280,633,572
4 01 03 2.0 1 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang difasilitasi		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	213,454,800	206,546,800	Pendapatan Bagi Hasil		persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	282,659,291
4 01 03 2.0 1 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Persentase meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang difasilitasi		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	72,968,600	27,943,600	Pendapatan Bagi Hasil		persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	118,667,093

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4 01 03 2 0 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang difasilitasi		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	65,643,400	65,643,400	Pendapatan Bagi Hasil		persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	85,004,410		
4 01 03 2 0 2	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>											1,010,933,875	920,933,875			1,293,282,149				
4 01 03 2 0 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi dan diterbitkan		100 %	100 %	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	100 %	577,175,350	487,175,350	Pendapatan Bagi Hasil		persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	611,520,182		
4 01 03 2 0 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi dan diterbitkan		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	164,516,025	164,516,025	Pendapatan Bagi Hasil		persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	307,362,296		
4 01 03 2 0 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi dan diterbitkan		100 %	100 %	8 Laporan	8 Laporan	100 %	100 %	269,242,500	269,242,500	Pendapatan Bagi Hasil		persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	374,399,671		
4 01 03 2 0 3	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>											1,897,303,240	1,743,303,240			2,413,758,780				
4 01 03 2 0 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa		100 %	100 %	105 Dokumen	105 Dokumen	100 %	100 %	292,685,800	292,685,800	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	100 %	369,170,561		
4 01 03 2 0 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa		100 %	100 %	45 Dokumen	45 Dokumen	100 %	100 %	291,243,100	291,243,100	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	100 %	362,252,821		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa		100 %	100 %	350 Orang	350 Orang	100 %	100 %	1,313,374,340	1,159,374,340	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	100 %	1,682,335,398		
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam											70,861,450	70,861,450			207,702,203			
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	persentase pemantauan terkait Sumber Daya Alam		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	26,102,150	26,102,150	Pendapatan Bagi Hasil	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	97,818,394		
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	persentase pemantauan terkait Sumber Daya Alam		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	22,305,400	22,305,400	Pendapatan Bagi Hasil	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	15,000,000		
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	persentase pemantauan terkait Sumber Daya Alam		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	22,453,900	22,453,900	Pendapatan Bagi Hasil	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	94,883,809		
<b>TOTAL</b>												<b>56,685,331,986</b>	<b>57,966,983,499</b>			<b>72,471,905,641</b>			

### 3.2.Pendanaan

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pontianak sesuai dengan program yang telah digariskan oleh Pemerintah Kota maupun Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pontianak dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 57.966.983.499,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.281.651.513,- (2.26 %) dari APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.56.685.331.986,- terdiri dari 3 Program, 20 Kegiatan dan 71 Sub Kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Pontianak

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2023, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2023 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Pontianak serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Pontianak tahun 2023.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi OPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama OPD di lingkup Pemerintah Kota Pontianak maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kota Pontianak. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2023, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2023

  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PONTIANAK  
**Dr. H. MULYADI, M. Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640421 198903 1 013



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PONTIANAK**

Jl. Rahadi Oesman No.3 – Telp. (0561) 732570,733040, 733041, 733042, Fax. 736029 Pontianak 78111  
Website : [www.pontianak.go.id](http://www.pontianak.go.id) Email/Akun : [sekda@pontianakkota.go.id](mailto:sekda@pontianakkota.go.id)

